

Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru

Selvi Sundari¹ Nurmasari²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution
No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: selvisundari@student.uir.ac.id

Abstract

Traditional medicine is a valuable part of Indonesian culture, widely used because it is seen as safer and more affordable. However, there are still circulating traditional medicines that contain chemicals (BKO) which can harm public health. The government, through the Food and Drug Monitoring Agency (BBPOM), has a vital role in controlling the distribution of these medicines. This study examines how BBPOM supervises the distribution of traditional medicines with Chemical Drugs in Pekanbaru and explores the challenges faced. Using a qualitative and descriptive approach, data were gathered via interviews, observations, and documentation from BBPOM Pekanbaru and related parties. Analysis involved describing on-field conditions based on facts and research findings. The findings show that supervision involves pre-market and post-market activities, such as inspecting production and distribution facilities, sampling and testing products, enforcing violations, and conducting outreach to businesses and the public. Challenges include limited personnel, restricted oversight areas, widespread online illegal medicines, and low public awareness regarding safe traditional medicines versus BKO-containing ones. To enhance consumer protection, better inter-agency coordination, additional staff, and increased community involvement in oversight are crucial.

Keywords: BBPOM, Traditional Medicine, Chemical Drugs, Consumers

Abstrak

Pengobatan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena dianggap lebih aman dan terjangkau. Namun, masih beredar obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang berisiko bagi kesehatan. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memegang peran penting dalam mengawasi distribusi obat-obatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan BPOM terhadap obat tradisional yang mengandung BKO di Pekanbaru dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan. Dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan BPOM Pekanbaru serta pemangku kepentingan terkait. Data dianalisis secara kualitatif, menggambarkan kondisi nyata berdasarkan fakta dan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Pekanbaru mengawasi obat tradisional yang mengandung BKO melalui kegiatan pra-pasar dan pasca-pasar, termasuk inspeksi fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan sampel dan pengujian produk, tindakan penegakan hukum, serta pemberian bimbingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, maraknya obat tradisional ilegal daring, serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang membedakan obat tradisional yang aman dari yang mengandung BKO masih terus berlangsung. Untuk perbaikan, peningkatan koordinasi antar lembaga, penambahan personel pengawas, dan peran masyarakat yang lebih aktif sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan melindungi kesehatan konsumen secara lebih baik.

Kata Kunci : BBPOM, Obat Tradisional, Bahan Kimia Obat, Konsumen

Pendahuluan

Permasalahan peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Obat tradisional pada dasarnya merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Indonesia yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai alternatif pengobatan. Penggunaan bahan alami dari tanaman obat dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan dan dianggap relatif aman oleh masyarakat. Namun dalam perkembangannya, tidak sedikit produk obat tradisional yang beredar di pasaran ternyata mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam komposisi obat tradisional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena penggunaan bahan kimia obat secara tidak terkontrol dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Peningkatan penggunaan obat tradisional di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang cukup tinggi terhadap produk herbal. Berbagai faktor seperti harga yang relatif terjangkau, kemudahan memperoleh produk, serta persepsi bahwa bahan alami lebih aman dibandingkan obat modern turut mendorong tingginya permintaan terhadap obat tradisional. Namun tingginya permintaan tersebut juga membuka peluang bagi produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk tradisional guna memberikan efek yang lebih cepat dirasakan oleh konsumen. Praktik tersebut jelas melanggar ketentuan keamanan produk dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan pengguna.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat. BPOM bertugas memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi, didistribusikan, dan dipasarkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, serta manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut meliputi berbagai jenis produk seperti obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan.

Pelaksanaan pengawasan BPOM di tingkat daerah dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang berada di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu unit tersebut adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru (BBPOM Pekanbaru) yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Provinsi Riau. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru mencakup kegiatan pre-market dan post-market, seperti evaluasi produk sebelum beredar, inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel produk, pengujian laboratorium, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi produk di wilayah Sumatra. Kondisi tersebut menjadikan Pekanbaru sebagai daerah yang cukup rentan terhadap peredaran berbagai produk obat tradisional dari berbagai daerah. Produk-produk tersebut dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi, baik secara langsung melalui toko obat tradisional maupun melalui media daring seperti media sosial dan platform perdagangan elektronik. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat juga turut mempermudah proses distribusi produk tanpa melalui pengawasan yang ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, BBPOM Pekanbaru masih menemukan berbagai kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Pada tahun 2024 misalnya, ditemukan ratusan jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dengan jumlah temuan yang cukup besar. Kandungan bahan kimia obat yang sering ditemukan dalam produk

tersebut antara lain sildenafil sitrat, parasetamol, deksametason, dan fenilbutazon. Penggunaan bahan kimia tersebut tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi hormon, tekanan darah tinggi, hingga ketergantungan obat.

Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru, kenyataannya peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat masih terus ditemukan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengawas, luasnya wilayah pengawasan, banyaknya jalur distribusi tidak resmi, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan berbagai faktor sosial dan kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru. Analisis terhadap proses pengawasan menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh BBPOM Pekanbaru, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik khususnya dalam bidang pengawasan kebijakan publik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat tradisional guna melindungi kesehatan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut (Pasolong, 2007) Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin (*Yunani*) yang terdiri atas dua kata, yaitu "*ad*" dan "*ministrate*" yang berarti "*to serve*" yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Sedangkan Dimock dan Dimock (Pasolong, 2007) mengemukakan bahwa secara etimologi kata administrasi berasal dari kata "*ad*" dan "*minister*" yang berarti juga "*to serve*". Menurut (Siagian, 2007) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Atmosudirjo (Zulkifli, 2005) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan administrasi modern yang menjadi wahana urusan dan sekaligus berlangsung didalamnya. Sedangkan menurut Siagian (Syafie, 2003) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Batas-batas administrasi menurut Silalahi (Zulkifli, 2005) adalah bentuk kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur kerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang

efektif dan efisien. Administrasi dapat dirangkum sebagai proses kerja yang dilakukan oleh individu dalam sebuah organisasi yang sejalan dengan tujuan bersama. Ini adalah pilar fundamental untuk keberhasilan pelaksanaan pengembangan, karena proses pengembangan tidak dapat berjalan secara efektif tanpa administrasi yang berjalan lancar.

Konsep Organisasi

Organisasi secara umum merupakan bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama organisasi menurut W.A. Anderson dan Frederick B.Parker (Sukidin & Basrowi, 2011) adalah struktur hubungan manusia yang didalamnya terdapat tujuan tertentu dan memiliki unit yang diatur secara sistematis untuk memajukan dan mengejar tujuan atau kepentingan bersama yang secara spesifik tidak dinyatakan dalam institusi. Organisasi terdiri atas dua pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.

Adapun definisi menurut (Zulkifli, 2005) menyatakan bahwa organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerja sama dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi. Organisasi juga dapat didefinisikan bahwa setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang/kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan dan rangkaian interaksi yang dilakukan orang-orang dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. sebuah organisasi adalah tempat di mana manajemen dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Manajemen adalah proses yang menjalankan semua kegiatan dalam organisasi. Tanpa manajemen yang tepat, sebuah organisasi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, sehingga sulit mencapai tujuan dengan efisien.

Konsep Manajemen

(Siagian, 2006) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitasnya bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik.

(Terry & Rue, 2014) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang disebut manajemen, dan orang yang melakukannya disebut manajer. Selain itu, fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh (Terry & Rue, 2014) yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling atau biasa disebut dengan (POAC).

manajemen melibatkan pengorganisasian kegiatan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, manajemen sangat penting bagi semua organisasi, terutama di tingkat manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin membutuhkan pengetahuan tentang manajemen untuk mengelola organisasinya secara efektif.

Konsep Pengawasan

Pengawasan melibatkan penetapan standar kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kinerja yang telah

ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan mengikuti tujuan yang direncanakan. Pada dasarnya, supervisi bertujuan untuk mencegah penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pengawasan menurut (Ndraha, 2003) ialah pengawasan itu selalu preventif, yaitu sebelum terjadi, dan bukanlah setelah sesuatu terjadi. Sedangkan menurut (Sujanto, 2002) pengawasan adalah “Segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.

Adapun pengawasan menurut (Ferianto & Shyta Triana, 2015) pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh seseorang atau badan di dalam lingkungan organisasi. Pengawasan ini dilakukan dengan pengawasan atasan langsung atau pengawasan secara rutin.

Adapun indikator pengawasan menurut (Ferianto & Shyta Triana, 2015) yaitu:

1. Tahap Penentuan Standar
Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Beberapa proses yang berulang ulang dan kontin, yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.
4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.
5. Tahap Pengambilan Koreksi
Bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain survei deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan subjek penelitian berdasarkan fakta lapangan sebagaimana adanya. Umumnya, analisis data kualitatif melibatkan pernyataan atau deskripsi yang diungkapkan melalui kata-kata atau penjelasan tertulis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi di antara individu atau kelompok. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru mengawasi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) oleh BBPOM Pekanbaru dianalisis berdasarkan indikator pengawasan yang meliputi penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, serta perbandingan pelaksanaan dengan standar.

1. Penetapan Standar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Pekanbaru telah menetapkan berbagai standar dalam pengawasan obat tradisional yang mengacu pada regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar tersebut meliputi ketentuan mengenai keamanan, mutu, serta izin edar produk obat tradisional. Selain itu, penerapan standar juga mengacu pada ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat tradisional diproduksi secara konsisten, aman dikonsumsi, dan tidak mengandung Bahan Kimia Obat.

BBPOM Pekanbaru juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai standar tersebut melalui berbagai media informasi seperti situs resmi BPOM dan aplikasi BPOM Mobile. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan produk obat tradisional yang beredar di pasaran.

Namun demikian, hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam memperoleh informasi terbaru terkait perubahan regulasi. Beberapa pelaku usaha mengharapkan adanya sosialisasi yang lebih rutin agar mereka dapat mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang menyatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap produk dengan efek yang cepat terkadang mendorong peredaran obat tradisional yang mengandung BKO.

Temuan ini sejalan dengan konsep pengawasan yang menyatakan bahwa penetapan standar merupakan dasar penting dalam proses pengendalian untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh BBPOM Pekanbaru dilakukan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan setiap tahun. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market dilakukan sebelum produk memperoleh izin edar, sedangkan pengawasan post-market dilakukan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BBPOM Pekanbaru melakukan berbagai kegiatan pengawasan seperti inspeksi ke sarana produksi dan distribusi, pengambilan sampel produk, serta pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan dan mutu produk obat tradisional. Selain itu, pengawasan juga dilakukan berdasarkan analisis risiko dan prioritas pengawasan yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha menilai bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM umumnya telah dilaksanakan secara terencana dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya surat tugas resmi serta pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis. Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha mengharapkan adanya transparansi yang lebih baik terkait jadwal dan prioritas pengawasan agar mereka dapat mempersiapkan diri dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. BBPOM Pekanbaru melakukan pemantauan terhadap jumlah sampel yang diuji, hasil pengujian laboratorium, serta laporan kegiatan pengawasan yang dipublikasikan melalui sistem informasi BPOM.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui kegiatan inspeksi lapangan dan pengambilan sampel produk obat tradisional yang beredar di masyarakat. Produk yang diperoleh dari hasil sampling kemudian diuji di laboratorium untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan dan mutu atau tidak.

Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, maka BBPOM akan melakukan tindakan korektif berupa pembinaan, peringatan, penarikan produk dari peredaran, hingga pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif kegiatan pengawasan telah mengalami perkembangan, terutama dalam proses verifikasi produk dan penguatan sistem pelaporan.

Namun demikian, beberapa pelaku usaha masih menilai bahwa efektivitas pengawasan di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan produk obat tradisional yang mengandung BKO di pasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan masih memerlukan evaluasi secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang lebih maksimal dalam melindungi masyarakat.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar

Perbandingan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan dilakukan melalui kegiatan observasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan. Dalam proses ini, BBPOM membandingkan hasil kegiatan pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan dalam regulasi untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam peredaran obat tradisional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Pekanbaru secara rutin melakukan observasi terhadap produk yang beredar di masyarakat, baik melalui pemeriksaan dokumen perizinan maupun pengujian terhadap kandungan produk. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk obat tradisional yang beredar tidak mengandung bahan kimia obat yang dilarang.

Meskipun pengawasan telah dilaksanakan secara sistematis, masih ditemukan beberapa penyimpangan berupa peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi peredaran produk tersebut, seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk yang memberikan efek cepat.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi kepada pelaku usaha, peningkatan pengawasan distribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional yang aman.

5. Tahap Pengambilan Koreksi

Tahap pengambilan tindakan koreksi dilakukan melalui pembinaan, peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga rekomendasi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tindakan koreksi telah dilaksanakan, efektivitasnya belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), dapat disimpulkan bahwa proses penetapan standar pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Standar tersebut mencakup persyaratan notifikasi produk, izin edar, serta ketentuan mengenai keamanan dan mutu obat tradisional. Meskipun secara normatif standar pengawasan telah ditetapkan dengan jelas, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha masih diperlukan agar kepatuhan terhadap regulasi dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pengawasan telah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang terstruktur, seperti penyusunan program kerja pengawasan, kegiatan pengawasan pre-market dan post-market, inspeksi sarana distribusi, pengambilan sampel, serta pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Meskipun kegiatan pengawasan tersebut telah berjalan secara rutin, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait sumber daya pengawasan serta luasnya wilayah kerja. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian target pengawasan sehingga masih ditemukan produk obat tradisional yang mengandung BKO beredar di masyarakat.

Selain itu, proses evaluasi dan tindakan korektif terhadap pelanggaran telah dilakukan melalui perbandingan antara kondisi di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya berbagai bentuk penyimpangan, seperti produk tanpa izin edar dan produk yang terbukti mengandung BKO. Faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha, motif keuntungan ekonomi, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk dengan efek pengobatan yang instan. Tindakan koreksi yang dilakukan meliputi pembinaan, pemberian peringatan, penarikan produk dari peredaran, hingga rekomendasi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas tindakan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan penegakan hukum serta peningkatan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menekan peredaran obat tradisional yang mengandung BKO.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Manajemen. (2014). *Effendi, Usman*. Rajawali Pers.
- Bisht. (2006). *Management and Organizational Effectiveness*.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta.
- Ferianto, A., & Shyta Triana, E. (2015). *pengantar manajemen (3 in 1)* (jarwanto, Ed.).
- Hamim, & Adnan, I. M. (2005). *Manajemen Pemerintahan*. UIR Press.
- Hartono, A. S. (2010). *Manajemen Pengawasan Organisasi*. Bumi Aksara.
- Herujito, Y. M. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen*. Grasindo.
- Maharani. (2014). *Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Universitas.
- Manullang, M. (2012a). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Manullang, M. (2012b). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Nurman. (2023). *Pengawasan Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat*.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Sari, D. P. (2011). *Pengawasan Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Tugas*. Universitas.
- Siagian, S. P. (2006). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. BUMI AKSARA.
- Siagian, S. P. (2012). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. BUMI AKSARA.
- Silalahi, U. (2013). *Asas-Asas Manajemen*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujamto. (2002). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sukidin, & Basrowi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendekia.
- Sukidin, & Darmadi, D. (2011). *metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Suprami, & Wulandari. (2012). *Pengawasan dan Kinerja Organisasi*.
- Syafie, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. BUMI AKSARA.

Selvi Sundari dan Nurmasari

- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wicaksana, & Rachman. (2018). *Pengawasan dan Pengendalian dalam Administrasi Publik*.
- Yukiarti. (2010). *Pengawasan Dalam Organisasi*.
- Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. UIR Press.
- Zulkifli. (2009). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. UIR Press.